

## Pendekatan Community Based Disaster Management (CBDM) Melalui Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kelurahan Jatibening

Anggita Talita Laveda<sup>1</sup>, Sari Ningsih<sup>2</sup>, Kiki Setyawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas  
Krisnadwipayana

[anggitalita@gmail.com](mailto:anggitalita@gmail.com)<sup>1</sup>, [sariningsih.moy@gmail.com](mailto:sariningsih.moy@gmail.com)<sup>2</sup>, [kikisetyawati@unkris.ac.id](mailto:kikisetyawati@unkris.ac.id)<sup>3</sup>

Submitted: 15/12/2023; Revised: 16/12/2023; Published: 03/01/2024

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v7i1.138>

### Abstract

*This research discusses community-based disaster management efforts in Indonesia, especially through the Disaster Alert Village program in Jatibening Baru Village, Bekasi City. Aims to analyze the implementation of Community Based Disaster Management (CBDM) in the Disaster Preparedness Village program with a focus on disaster mitigation, priority handling, evaluation of disaster management performance, and resource mobilization. The research method used is a descriptive qualitative method and refers to the theory of Community-Based Disaster Management. The research results found that the research results show that disaster management involves three important stages, namely before, during and after a disaster occurs. The aim of this series of activities is to reduce disaster risks and increase community resilience in facing them. The active role of government and community participation is very important in efforts to better manage disaster risks. There are several supporting factors for Community Based Disaster Management (CBDM) in Disaster Preparedness Villages (KSB), namely: (1) Availability of an adequate budget is very important in implementing the KSB program (2) Citizen participation (3) Establishment of good communication between all stakeholders. Meanwhile, the inhibiting factors for Community Based Disaster Management (CBDM) in Disaster Preparedness Villages (KSB) are: (1) Socialization and training that are not yet optimal; (2) Lack of logistics storage warehouses (3) Lack of enforcement of DAS (River Watershed) regulations.*

*Keywords: CBDM, Disaster Preparedness Village*

### Abstrak

Penelitian ini membahas upaya penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Indonesia, terutama melalui program Kampung Siaga Bencana di Kelurahan Jatibening Baru, Kota Bekasi. Bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Community Based Disaster Management (CBDM) dalam program Kampung Siaga Bencana dengan fokus pada mitigasi bencana, prioritas penanganan, evaluasi kinerja penanganan bencana, dan mobilisasi sumber daya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dan mengacu pada teori Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat. Hasil penelitian menemukan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan bencana melibatkan tiga tahap penting yaitu sebelum, saat, dan setelah terjadinya bencana. Tujuan dari serangkaian kegiatan ini adalah untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapinya. Peran aktif pemerintah dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya mengelola risiko bencana dengan lebih baik. Terdapat beberapa faktor pendukung Community Based Disaster Management (CBDM) Dalam Kampung Siaga Bencana (KSB) yaitu Ketersediaan anggaran yang

memadai sangat penting dalam penerapan program KSB, Partisipasi Warga, Terjalannya komunikasi yang baik antara semua pihak stakeholder. Sedangkan faktor penghambat Community Based Disaster Management (CBDM) Dalam Kampung Siaga Bencana (KSB) yaitu Sosialisasi dan pelatihan yang belum optimal, Kurangnya gudang penyimpanan logistik, Kurangnya penegakan aturan DAS (Daerah Aliran Sungai).

Kata Kunci : CBDM, Kampung Siaga Bencana

## **Pendahuluan**

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi tersebut sangat berpotensi tinggi sekaligus rawan terhadap terjadinya berbagai jenis bencana. Maka dari itu, diperlukan upaya dalam mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana berupa serangkaian kegiatan baik sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana yang disebut sebagai penanggulangan bencana.

Penanggulangan bencana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan peraturan tersebut maka seluruh penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai daerah otonom khususnya dalam penanggulangan bencana diarahkan kepada perubahan mind set dan cultural set untuk mengurangi risiko bencana sebagai wujud kemandirian daerah. Berdasarkan data BNPB pada awal tahun baru 2020 lalu telah terjadi bencana banjir dan longsor yang melanda sebagian daerah di Indonesia khususnya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya dengan cukup ekstrim dan merupakan bencana banjir terbesar yang pernah terjadi. Korban banjir di Kota Bekasi sendiri tercatat kurang lebih ada 70.002 jiwa pengungsi, 9 jiwa meninggal dunia, serta ketinggian air maksimal adalah 6 meter.

Kota Bekasi memiliki cukup banyak daerah-daerah dengan kondisi lahan cekung, sehingga berpotensi terkena banjir. Hal ini tentunya memiliki dampak besar serta membawa kerugian bagi Kota Bekasi yang di antaranya meliputi korban jiwa, berbagai masalah kesehatan, terhambatnya kegiatan ekonomi, kehilangan harta benda, rusaknya rumah penduduk serta fasilitas umum. Bencana ini menjadi masalah publik yang menuntut para administrator untuk dapat melakukan tindakan yang tepat dalam menanggulangnya. Untuk itu, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Sosial Kota Bekasi membentuk sebuah program penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya yaitu program Kampung Siaga Bencana.

Program Kampung Siaga Bencana dibentuk pada tahun 2014 di empat Kecamatan rawan banjir di Kota Bekasi yaitu Bekasi Barat, Bekasi Utara, Bekasi Timur dan Jatiasih. Namun baru pada tahun 2022 lalu, Program Kampung Siaga Bencana ini dibentuk di Kecamatan Pondok Gede tepatnya di Kelurahan Jatibening Baru. Kelurahan Jatibening Baru termasuk salah satu wilayah yang cukup sering terjadi banjir saat hujan deras. Pada tanggal 2 Oktober 2022 lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi mengeluarkan laporan mengenai kejadian banjir di Kota Bekasi. Banjir akibat hujan deras disertai petir ini terjadi di perumahan Jatibening Baru dengan ketinggian air 75 cm. Bahkan kejadian bencana belum lama ini juga terjadi di wilayah Kelurahan Jatibening Baru pada Minggu, 26 Februari 2023 lalu, sejumlah rumah rusak diterpa angin puting beliung karena curah hujan yang tinggi. dibentuknya program Kampung Siaga Bencana di Jatibening Baru dilatarbelakangi oleh tingkat kesadaran masyarakat akan risiko dampak bencana yang masih sangat kurang. Sebagian besar masyarakat masih menganggap diri mereka sebagai korban sehingga mereka hanya menunggu bantuan dari pemerintah dan relawan.

Kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana masih rendah sejalan dengan tingkat pengetahuan masyarakat akan bencana banjir yang tergolong minim. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah khususnya Kelurahan Jatibening Baru dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Konsep Manajemen Publik**

Konsep manajemen publik merujuk pada praktik-praktik dan teori-teori yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi dan layanan publik oleh pemerintah atau entitas publik lainnya. Tujuan utama dari konsep manajemen publik adalah untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik serta pengelolaan sumber daya publik.

Manajemen publik pada dasarnya adalah manajemen instansi pemerintah (Pasolong, 2008:83). Selanjutnya menurut Overman, manajemen publik adalah studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* satu sisi dengan SDM, keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lain

## **Community Based Disaster Management (Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat)**

Berangkat dari pemikiran bahwa ketika masyarakat dapat mengatasi masalahnya sendiri maka otomatis masyarakat tersebut sudah dapat berdaya atau dengan kata lain berfungsi secara sosial. Demikian pula dalam menghadapi bencana yang merupakan masalah sosial. Berdasarkan pemikiran tersebut, hadirilah Community Based Disaster Management sebagai sikap baru untuk masyarakat dalam berhadapan dengan bencana.

Menurut Paripurno (2006), Community Based Disaster Management atau penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah sebuah pendekatan yang mendorong komunitas akar rumput dalam mengelola risiko bencana lokal setempat. Upaya tersebut memerlukan serangkaian upaya dalam melakukan interpretasi sendiri atas ancaman dan risiko bencana yang dihadapinya, melakukan prioritas penanganan atau pengurangan risiko bencana yang dihadapinya, mengurangi serta memantau dan mengevaluasi kinerja sendiri dalam upaya pengurangan bencana. Namun pokok dari keduanya adalah penyelenggaraan yang seoptimal mungkin memobilisasi sumber daya yang dimiliki dan yang dikuasainya serta merupakan bagian internal dari kehidupan keseharian komunitas.

### **Kampung Siaga Bencana (KSB)**

Kampung Siaga Bencana (KSB) adalah sebuah wadah Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat yang dijadikan kawasan atau tempat untuk program Penanggulangan Bencana.

Adapun tujuan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
2. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh menghargai budaya lokal.
3. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
4. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5. Tujuan dibentuknya Kampung Siaga Bencana memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan resiko bencana.
6. Membentuk jejaring siaga bencana berbasis masyarakat.
7. Memperkuat interaksi sosial anggota masyarakat dan mengorganisasikan masyarakat terlatih siaga bencana.
8. Menjamin terlaksananya kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat yang berkesinambungan.
9. Mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk penanggulangan bencana.

### **Mitigasi Bencana**

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial.

Sedangkan pengertian Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Adapun tujuan dari mitigasi bencana, yaitu:

1. Mengurangi dampak yang ditimbulkan, khususnya bagi penduduk.
2. Sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena bertujuan untuk memahami fenomena penelitian secara mendalam atau memahami permasalahan yang sedang dibahas. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yang lebih menekankan pada makna, proses, persepsi, motivasi, tindakan maupun perilaku. Yang bertujuan untuk mengetahui atau menggambarkan secara utuh kenyataan dari kejadian yang diteliti. Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif.

Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah di Kantor Kelurahan Jatibening Baru, Jl. Raya Jatiutama Blok N RT.013/RW.008, Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bks, Jawa Barat 17412, Indonesia. Jenis data yang digunakan penulis didalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa gambar/dokumentasi, dokumen/arsip, pernyataan dan perkataan informan. Dan juga bukan berupa angka-angka.

## Pembahasan

### **Pelaksanaan Community Based Disaster Management (CBDM) dalam Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kelurahan Jatibening Baru**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan bencana melibatkan tiga tahap penting yaitu sebelum, saat, dan setelah terjadinya bencana. Tujuan dari serangkaian kegiatan ini adalah untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapinya. Peran aktif pemerintah dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya mengelola risiko bencana dengan lebih baik. Prioritas penanganan kebencanaan adalah menyelamatkan nyawa dan melindungi keselamatan warga melalui respons darurat, pencegahan, koordinasi, pemulihan, dan akuntabilitas. Evaluasi kinerja penanganan kebencanaan di tingkat kelurahan menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi tindakan yang diambil, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam upaya mitigasi dan respons bencana. Mobilisasi sumber daya juga menjadi kunci penting dalam penanganan kebencanaan di tingkat kelurahan. Penghimpunan dan koordinasi sumber daya manusia dan logistik menjadi krusial dalam meningkatkan respons dan kesiapan menghadapi bencana. Dalam menghadapi kendala dan tantangan, diperlukan kerjasama yang baik antara kelurahan,

pemerintah, dan stakeholder terkait. Penyusunan rekomendasi perbaikan dan pengembangan kapasitas melalui evaluasi kinerja dapat membantu kelurahan dalam menghadapi bencana dengan lebih baik di masa depan.

### **Kendala dan Faktor Pendukung dalam Community Based Disaster Management (CBDM) dalam Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kelurahan Jatibening Baru**

Dalam pelaksanaan Community Based Disaster Management (CBDM) Dalam Kampung Siaga Bencana (KSB) tentunya terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Terdapat beberapa faktor pendukung Community Based Disaster Management (CBDM) Dalam Kampung Siaga Bencana (KSB) yaitu: (1) Ketersediaan anggaran yang memadai sangat penting dalam penerapan program KSB (2) Partisipasi Warga (3) Terjalannya komunikasi yang baik antara semua pihak stakeholder. Sedangkan faktor penghambat Community Based Disaster Management (CBDM) Dalam Kampung Siaga Bencana (KSB) yaitu: (1) Sosialisasi dan pelatihan yang belum optimal; (2) Kurangnya gudang penyimpanan logistik (3) Kurangnya penegakan aturan DAS (Daerah Aliran Sungai).

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada penelitian tentang Community Based Disaster Management (CBDM) Dalam Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kelurahan Jatibening Baru, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Community Based Disaster Management (CBDM) Dalam Kampung Siaga Bencana (KSB) perlu melibatkan tiga tahap penting seperti, sebelum terjadinya bencana, saat terjadinya bencana, dan setelah terjadinya bencana. Peran aktif pemerintah dan partisipasi masyarakat yang sangat penting dalam proses mitigasi bencana dengan prioritas penanganan kebencanaan yang menyelamatkan nyawa dan melindungi keselamatan warga, evaluasi kinerja penanganan kebencanaan di tingkat kelurahan juga sangatlah penting untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, serta mobilisasi sumber daya menjadi kunci penting dalam penanganan kebencanaan di tingkat kelurahan. Koordinasi dan penghimpunan sumber daya manusia dan logistik menjadi hal yang krusial dalam meningkatkan respons dan kesiapan menghadapi bencana.

Faktor pendukung Community Based Disaster Management (CBDM) Dalam Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kelurahan Jatibening Baru yaitu ketersediaan anggaran yang memadai sangat penting dalam pelaksanaan program KSB, partisipasi warga, dan terjalannya komunikasi yang baik antara semua pihak stakeholder. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu sosialisasi dan pelatihan yang belum optimal, kurangnya gudang penyimpanan logistik, dan kurangnya penegakan aturan DAS (Daerah Aliran Sungai).

### Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). Analisis Kebijakan Dari Reformasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. (2012). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabetha.
- Ardiyansah, A., Farida, N., Warsono, H., & ., K. (2022). Stakeholder Analysis in the Development of Saba Budaya Baduy. *KnE Social Sciences*, 7(5), 336–349. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i5.1056>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2015). *Buku Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019*. Jakarta.
- Cahyadi, A. (2017). Pengaruh Kebencanaan dan Sikap Masyarakat Terhadap Kesiapsiaaan Menghadapi Bencana Tanah Longsor (Studi di Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor). *Jurnal Prodi Manajemen Bencana*. Volume 3 Nomor 2.
- Christanto, J. (2011). *Gempa Bumi, Kerusakan Lingkungan, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan*: Liberty.
- Departemen Sosial RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Dumaris, M. (2022). Implementasi Program Kampung Siaga Bencana Dalam Bencana Banjir di Kelurahan Kampung Melayu Kota Jakarta Timur. Thesis Program Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik.
- Edi, Warsidi. (2015). *Bencana Alam di Indonesia Seri Pengetahuan Bencana*. Bekasi: CV. Mitra Utama.
- Faturahman, B. M. (2017). Reformasi Administrasi Dalam Manajemen Bencana. *MIMBAR YUSTITIA*. Vol 1. Nomor 2. E-ISSN: 2580-457X. Hal 187.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Implementation as a Political and Administrative Process*. New Jersey: Princetown University Press.

- Haikal, M. F. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Alam Untuk Mengurangi Risiko Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor. Skripsi Administrasi Publik.
- Hariyadi, A. R. (2021). Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia. *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 2(2), 259-276.
- Hasibuan, Malayu. (2006). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herianto, R., dkk (2015). Community Based Disaster Management. *PROSIDING KS: RISET & PKM. VOLUME: 2. NOMOR: 3. HAL: 301-444. ISSN: 2442-4480*.
- Ikhwan, K. (2018). Pemberdayaan Menuju Masyarakat Siaga Bencana Melalui Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) di Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Skripsi Administrasi Publik.
- Jones. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kinanti, D. C. (2022). Implementasi Program Kampung Siaga Bencana di Desa Wlahar Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. *Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial*. Vol No.4.
- Labolo, M. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lestari, E. (2021). Rencana Tanggap Darurat Masyarakat Menghadapi Bencana Banjir. *Jurnal Keperawatan*. Volume 13 Nomor 1.
- Mahendradi, M., & Ardiyansah, A. (2020). Fenomena Kondisi Sanitasi Air Bersih di Rusunawa Tanggalrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang. *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 1(2), 78-84.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Mazmanian, Daniel H dan Sabatier, Paul A. (1983). *Implementation and Public Policy*. New York: HarperCollins.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ningsih, S., Firdausijah, R. T., & Alamsyah, K. (2023). DIGITAL-BASED HR DEVELOPMENT STRATEGY IN IMPROVING EMPLOYEE PERFORMANCE AT THE TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT TESTING CENTER. *Vegueta. Anuario de la Facultad de Geografía e Historia*, 23(1), 89-103.
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Pariपुरno, Eko Teguh. (2006). *Community Based Disaster Management. Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI)*.
- Pramitasari, Anisa (2021) *COLLABORATIVE GOVERNANCE: Merangkai Strategi Pembangunan Berkelanjutan*. Edisi Pertama ed. CV. Syntax Corporation Indonesia, Jakarta. ISBN 978-623-6609-43-9

- Pratiwi, P. S., & Ningsih, S. (2022). Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pada Pelayanan Publik di Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur Tahun 2020. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 5(1), 44-50.
- Purnomo, Hadi. (2010). *Manajemen Bencana, Respon dan Tindakan Terhadap Bencana*. Media Pressindo: Yogyakarta.
- Sopaheluwakan, Jan. Dkk. (2006). *Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami*. LIPI: UNESCO/ISDR.
- Sugito, S., Waluyo, S. S. ., & Pramitasari, A. . (2023). Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. *ANTASENA: Governance and Innovation Journal*, 1(1), 15–24. <https://doi.org/10.61332/antasena.v1i1.112>
- Sulistiyono, A. (2022). ANALISIS KINERJA KARYAWAN SELAMA PANDEMI COVID-19 PADA PT LINTASARTA DI JAKARTA PUSAT. *KOLONI*, 1(2), 778-789.
- Triyono, dkk. (2014). *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Gempa Bumi dan Tsunami Berbasis Masyarakat*. Jakarta: BNPB.
- Umeidini, F. Dkk. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinagor. *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Volume 2. Nomor 1. ISSN: 2620-336.
- Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in: Administration and Society*. London: Sage..
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif)*. Yogyakarta: CAPS.